



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SABARTUA TAMPUBOLON**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **215933**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.481.987.727

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/89.98 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/27 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 221.987.727

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 220.200.000

1. MOTOR, KAWASAKI KAZE R SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
2. MOTOR, HONDA FIT X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO A1F02N36M1 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 61.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 787.118.609**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.550.306.336**III. HUTANG** Rp. 9.632.927**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.540.673.409

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.